

DAFTAR PUTAKA

- Ibrahim, Jhony.2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media.
- Johny, Ruby Hadiarti. 2013. PIH (Pengantar Ilmu Hukum). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan.2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki,Peter Mahmud. 2010.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predia Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1982.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta: Liberti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad,Bushar.1981.*Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Partanto, Pius dan Trisno Yuwono. 1994.*Kamus Bahasa Indonesi.*, Surabaya: Arkola.
- Rasaid, M. Nur. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Samudera, Teguh. 1992. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata.Bandung: Alumni.
- Sugangga, ING.1995.Hukum Waris Adat. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata.2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*.Bandung :Mandar Maju.
- Syahrani, H. Riduan. 2000. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tamakiran.1972.Asas- asas Hukum Waris. Bandung: Puionir Jaya.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutyoso. 2007.Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
- Zaini, Muderis. 2002.*Adopsi;Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4.

Jurnal:

Kusuma, Agnesia Ariesta. 2012. *Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) Naskah Publikasi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Prayitno, Kwat Puji. 2016. Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Giri, Mahyudin. 2016, *Kompetensi Absolut Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam (Studi Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.Pwt dan Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2015/PA.Pwt)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

Perundang- undangan:

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 6 tahun 1983 Mengenai Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Lain-lain:

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 34/PDT.G/PN.Pwt.

<https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-anak-angkatdan-pengangkatan.html?m=1> (Diakses pada tanggal 2 November 2016 pukul 06.50 WIB).

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html> (Diakses pada tanggal 1 November 2016 pukul 06.00 WIB).

<https://husnisyams.wordpress.com/2010/03/30/pengangkatananak/> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 16.50 WIB).

<http://independentlawfirm.blogspot.co.id/2016/02/upaya-hukumterhadap-putusan-verstek.html?m=1> (Diakses pada tanggal 15 Desember 2016 Pukul 06.30 WIB)

<https://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/15/perbedaan-dan-persamaan-gugatan-class-action-gugatan-perdata-biasa/> (diakses pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 05.45 WIB).

<http://web.unmetered.co.id/kedudukan-anak-angkat-terhadap-harta/> (Diakses pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 08.00 WIB).